

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berge, N. S. (1993). *Pengamat Hukum perizinan, disunting oleh Phillipus M. Hadjon*. Surabaya: Yuridika.
- Faried Ali, d. (2012). *Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori, dan Aplikasi Sample Teknik Analisa Kebijakan pemerintahan*. Bandung: Aditama.
- Fischer, F. (2015). *Handbook, Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan* . Surabaya: Yunidika.
- Handikusuma, H. (2013). *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi negara*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Islamy. (1997). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Johan, T. S. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kerlinger, F. N. (1996). *Asas – Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lexy, J. M. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, S. M. (2006). *Pokok-pokok Hukum Administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik- Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Salim, P. (1989). *The Contemporary English-indonesia*. Jakarta:: Dictionary, Modern English Press.
- Sellang, k. (2019). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi Konsep Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: Qiara media.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.
- Subarsono. (2008). *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, J. R. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sutanto, T. (2014). *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*. Jakarta: Buku Pintar.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafr, U. S. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Sumedang: IPDN Press .
- Thamrin, H. (2013). *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Utrech, E. (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar .
- Widodo, T. T. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed.) Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Gedung

Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 juncto Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Peraturan Presiden 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014, yang mengatur tentang pemungutan retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar

Makalah dan Jurnal

- Juliani, H. (2018). Eksistensi badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Eksistensi badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Administrative law & Governance Journal*, 47-78.
- M. Taufik Rachman, N. P. (2018). Implementasi Sistem Informasi, Administrasi dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Bayan. *Implementasi Sistem Informasi, Administrasi dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Bayan*, 48-55.
- Suhartoyo. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP). *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)*, 144.

Web

<https://www.suara.com/bisnis/2019/02/27/055814/ada-simbg-pengajuan-imb-dan-slf-jadi-lebih-rapih-dan-transparan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 13.17

WIB

<https://sinarkeadilan.com/kadis-penanaman-modal-gelar-uji-coba-sistem-manajemen-pelayanan-terpadu-terintegrasi-di-siantar/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul

11.17

Wawancara

Mardiana selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP (Pematangsiantar: 6 Januari 2019)

Dedi Arnold T Hutabarat selaku analis dokumen perizinan DPMPTSP
(Pematangsiantar: 16 Maret 2020)

Dedi Arnold T Hutabarat selaku analis dokumen perizinan DPMPTSP
(Pematangsiantar: 04 April 2020)

